

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

a. Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau tidak memiliki kapabilitas dalam menunjang kinerja pemerintah mencapai visi Riau 2020. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan organisasi ini dirumuskan melalui musyawarah sesuai ketentuan namun tidak melibatkan seluruh unsur sebagaimana mestinya, selain itu pengurus organisasi ini juga tidak memiliki tujuan sesuai dengan prilaku kepengurusan serta tidak memiliki sasaran secara tertulis.

2. Penetapan Strategi

Organisasi ini memiliki visi dan misi yang tidak mempunyai target waktu yang jelas, selain itu pengurus organisasi ini juga tidak memiliki visi dan misi sebagai penjabaran atas visi dan misi utama organisasi serta tidak memiliki program kerja dalam menjalankan organisasi sehingga tidak memiliki strategi dalam mencapai tujuan.

3. Penyusunan Struktur Organisasi

Penyusunan struktur pada organisasi ini dilakukan melalui musyawarah sesuai ketentuan namun demikian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara struktur organisasi yang tertera pada AD/ART dengan struktur kepengurusan Lembaga

Adat Melayu Riau periode 2017-2022 dimana terdapat penambahan bagian-bagian diluar struktur yang ada.

4. Pengelompokan Kegiatan Organisasi

Pengelompokan kegiatan pada organisasi ini dilakukan berdasarkan pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditentukan, namun demikian tidak seluruh bagian pada organisasi ini yang memiliki tugas secara tertulis sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya.

5. Penempatan Anggota Organisasi

Penempatan anggota pada organisasi ini dilakukan oleh pimpinan organisasi terpilih sesuai hasil kesepakatan meski tidak ada aturan organisasi yang mengatur secara spesifik mengenai ketentuan tersebut. Penafsiran inilah yang kemudian menuai polemik dikalangan tokoh-tokoh Melayu Riau.

6. Pengembangan Anggota Organisasi

Pengembangan anggota pada organisasi ini ditujukan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat Melayu Riau yang merupakan bagian dari anggota organisasi sementara pengembangan pengurus sebagai penggerak organisasi justru tidak dilakukan meski dalam realitanya terdapat banyak kekurangan dalam menjalankan roda organisasi.

7. Pemantauan Proses Kerja

Pemantauan proses kerja pada organisasi ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang dimiliki. Pemantauan proses kerja hanya mengandalkan kesadaran individu dengan mengesampingkan fungsi

pengawasan sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi karena tidak dimilikinya kesadaran pelaksanaan menjalankan tugas dan fungsinya.

8. Pengukuran Prestasi Kerja

Pengukuran prestasi kerja pada organisasi ini adalah penilaian laporan pertanggungjawaban serta penilaian pelaksanaan program kerja sedangkan pengukuran prestasi kerja individu tidak dilakukan disebabkan oleh tidak adanya aturan maupun inisiatif pimpinan organisasi sehingga pengukuran prestasi kerja tidak dilakukan pada organisasi ini.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau

1. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial yang dimiliki organisasi ini bersumber seluruhnya dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau sehingga organisasi ini memiliki ketergantungan yang tinggi dan anggaran tersebut sangat bernilai vital bagi pelaksanaan aktivitas organisasi.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki organisasi ini tidak mampu menunjang kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki akibat kegagalan dalam proses rekrutmen yang dilakukan.

3. Sumber daya fisik

Organisasi ini memiliki sumber daya fisik yang seluruhnya berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau sehingga sumber daya fisik yang dimiliki

organisasi ini memiliki peran sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Kerja sama

Kerja sama antara LAM Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan berupa upaya masing-masing pihak menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya sehingga tidak terjalin adanya kerja sama antar keduanya yang disebabkan oleh tidak *roadmap* dalam mencapai visi Riau 2020.

5. Reputasi

Organisasi ini dari sisi kehadirannya mendapat respon positif namun dikarenakan kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan dan harapan serta belum mampu menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Riau maka organisasi ini kemudian memiliki reputasi buruk.

6. Sikap

Organisasi ini toleran dalam menyikapi perbedaan budaya yang ada di Provinsi Riau, namun demikian organisasi ini tidak konsisten dalam memperjuangkan tujuannya yang terlihat dari perannya yang melegitimasi seluruh kebijakan pemerintah meski bertentangan dengan tujuan yang dimiliki.

VI.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengajukan saran-saran untuk bahan masukan sebagai berikut:

1. Sebagai ormas Melayu terbesar di Provinsi Riau dan telah mendapat *support* berupa anggaran dan sarana prasarana dari pemerintah semestinya Lembaga

Adat Melayu Riau lebih serius dalam mengelola organisasinya melalui pelaksanaan fungsi perancangan, pengorganisasian, penempatan dan pengendalian secara optimal.

2. Lembaga Adat Melayu Riau seharusnya melakukan rekrutmen pengurus organisasi secara optimal sesuai aturan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
3. Kerja sama antara Lembaga Adat Melayu Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau semestinya memiliki *roadmap* yang jelas sehingga tergambar hubungan kerja dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pihak.
4. Lembaga Adat Melayu Riau semestinya bersikap konsisten dalam menjalankan organisasinya untuk membela masyarakat adat dan budaya Melayu Riau sehingga memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan organisasi.